

BAB ENAM

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Daya Saing Provinsi Jambi dan Provinsi Lainnya di Indonesia**(a) Daya Saing Input**

Hasil perhitungan analisis pembentuk daya saing input dengan indikator lingkungan usaha produktif menunjukkan bahwa Provinsi Jambi hanya berada di **peringkat ke-19** dengan skor sebesar 0.901, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewakili indikator lingkungan usaha produktif, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel LUP2 (peringkat ke-9), LUP1 (peringkat ke-15), dan LUP4 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel LUP5 (peringkat ke-24) dan LUP3 (peringkat ke-19). Di Pulau Sumatera, Provinsi yang memiliki daya saing tinggi (10 provinsi peringkat teratas) adalah Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-7) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Barat (peringkat ke-13), Riau (peringkat ke-16), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) adalah Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-25), Sumatera Selatan (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-28).

Apabila dilihat dari indikator daya saing input dengan variabel perekonomian daerah, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati **urutan ke 15** dengan skor 0.572, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari keenam variabel yang mewakili indikator perekonomian daerah, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel PD4 (peringkat ke-12), dan PD3 (peringkat ke-15). Peringkat terendah pada variabel PD4 (peringkat ke-29), PD5 (peringkat ke-19), PD6 (peringkat ke-18), dan PD1 (peringkat ke-16). Pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong masuknya investasi asing ke Provinsi Jambi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-6) dan Riau (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-11), Lampung (peringkat ke-14), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bangka Belitung (peringkat ke-31), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-28), dan Kepulauan Riau (peringkat ke-26).

Apabila dilihat dari indikator daya saing input dengan variabel sumber daya manusia, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati **urutan ke 17** dengan skor 1.216, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewakili indikator sumber daya manusia, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel SDM1 (peringkat ke-9), SDM3 (peringkat ke-15), dan SDM5 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel SDM2 (peringkat ke-20), dan SDM4 (peringkat ke-20).

Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan *pro-job* agar dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga jumlah orang yang mendapat pekerjaan semakin tinggi. Di Pulau Sumatera, hanya terdapat satu provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bengkulu (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-18), Kepulauan Riau (peringkat ke-21), Sumatera Selatan (peringkat ke-22), dan Lampung (peringkat ke-23) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-34), Riau (peringkat ke-33), dan Sumatera Barat (peringkat ke-32).

Untuk lingkup infrastruktur dan sumber daya alam, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati **urutan ke 25** dengan skor 0.783, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing rendah” dan menjadi yang terendah diantara indikator daya saing input lainnya. Dari kelima variabel yang mewakili indikator infrastruktur dan sumber daya alam, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel ISDA1 (peringkat ke-20), ISDA2 (peringkat ke-20), dan ISDA4 (peringkat ke-22). Peringkat terendah pada variabel ISDA3 (peringkat ke-30), dan ISDA5 (peringkat ke-25). Untuk meningkatkan daya saing indikator infrastruktur dan sumber daya alam, pemerintah daerah Provinsi Jambi perlu meningkatkan skor daya saing terutama kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik dan akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-4) dan Sumatera Selatan (peringkat ke-6). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-12), Kepulauan Riau (peringkat ke-20), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Riau (peringkat ke-24) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) selain Provinsi Jambi, yaitu Lampung (peringkat ke-26), Bangka Belitung (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-33).

Setelah dilakukan analisis keempat variabel dari indikator daya saing input secara nasional, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jambi menempati **peringkat ke 19** yang masuk dalam kategori provinsi dengan daya saing menengah. Dari semua variabel indikator daya saing input, indikator yang berkontribusi besar dalam daya saing input Provinsi Jambi adalah indikator perekonomian daerah dan lingkungan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan daya saing inputnya pemerintah daerah perlu meningkatkan skor daya saing semua indikator, terutama indikator infrastruktur dan sumber daya alam, serta lingkungan usaha produktif. Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing input kategori menengah selain Provinsi Jambi, adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-16), Kepulauan Riau (peringkat ke-17), Riau (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-24) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-31), Bengkulu (peringkat ke-30), dan Sumatera Barat (peringkat ke-28).

(b) Daya Saing Output

Apabila dilihat dari variabel produktivitas tenaga kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.917 dan menempati **urutan ke 8** yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu

Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) dan Riau (peringkat ke-4). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Bangka Belitung (peringkat ke-13), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-19), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-30).

Pembentuk daya saing output **kedua** adalah tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Berdasarkan variabel tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.013 dan menempati **urutan ke 11** yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-8) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Lampung (peringkat ke-15), Sumatera Selatan (peringkat ke-17), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Sumatera Utara (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-30), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27), dan Riau (peringkat ke-25).

Selanjutnya, pembentuk daya saing output **ketiga** adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di

suatu wilayah/daerah. Juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Bila daya saing diukur dengan variabel PDRB per kapita, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.961 dan menempati **urutan ke 8** yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3), Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-12, Sumatera Selatan (peringkat ke-13), Sumatera Barat (peringkat ke-21) dan Lampung (peringkat ke-23) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-29) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27).

Keempat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan daya saing output menggunakan variabel IPM, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.003 dan menempati **urutan ke 16** yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu

Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-4), Riau (peringkat ke-6), dan Sumatera Barat (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-17), Bengkulu (peringkat ke-18), Sumatera Selatan (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, tidak ada satupun provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah).

Keseluruhan variabel pembentuk daya saing output tersebut kemudian digabungkan untuk menentukan provinsi mana yang memiliki daya saing output tertinggi dan terendah. Provinsi Jambi menempati **posisi ke-8**, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Dengan skor standar 0.974. Dari semua variabel pembentuk daya saing output, variabel yang berkontribusi besar dalam daya saing output Provinsi Jambi adalah variabel produktivitas tenaga kerja dan PDRB per kapita. Untuk meningkatkan daya saing outputnya pemerintah daerah perlu meningkatkan skor daya saing output, terutama variabel tingkat kesempatan kerja, dan IPM. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing output kategori menengah, adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-28) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-26).

(c) Daya Saing Input Output

Daya saing ekonomi suatu daerah merupakan topik yang menarik untuk dicermati karena globalisasi mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi semakin meningkat tajam dan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Provinsi Jambi sebagai daerah bagian di Indonesia mengikuti kecenderungan daya saing daerah yang berlaku. Untuk Daya Saing Input Output Keseluruhan, Provinsi Jambi menempati **posisi ke-13**, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas untuk daya saing input output secara keseluruhan, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-5) Kepulauan Riau (peringkat ke-6), dan Riau (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing output kategori menengah, selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-11), dan Sumatera Selatan (peringkat ke-14). Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-30), Sumatera Barat (peringkat ke-26), dan Lampung (peringkat ke-25).

Gambaran daya saing provinsi di Indonesia merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu provinsi, dan adapun juga sebaliknya. Dalam penghitungannya, skor daya saing tiap provinsi di Indonesia, dibandingkan dengan rata-rata skor input (rata-rata skor indikator input, 1.1346) dan output (rata-rata skor indikator output, 1.0000) dari keseluruhan skor daya saing provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan **Provinsi Jambi berada pada kuadran III** menunjukkan daerah yang memiliki skor input dan output dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan **daya saing rendah**.

(2) Daya Saing Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

(a) Daya Saing Input

Dilihat dari daya saing usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kota Sungai Penuh. Seperti hasil pada analisis lain yang terkait, misalnya daya saing dari angka LQ dan Klassen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan peringkat terendah dilihat dari aspek input lingkungan usaha produktif.

Dilihat dari dengan menggunakan indikator perekonomian daerah, seperti hal nya lingkungan usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun. Dengan indikator ini, Kota Sungai Penuh justru berada pada peringkat terbawah bersama Kabupaten Kerinci

Analisis daya saing input berikutnya adalah dari sisi sumber daya manusia. Adapun indikatornya terdiri dari Rasio ketergantungan (SDM1), Jumlah penduduk yang bekerja (SDM2), Jumlah penduduk yang menganggur (SDM3), Jumlah angkatan kerja (SDM4), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDM5). Dari hasil pemeringkatan, Kota Jambi tetap menjadi peringkat pertama dalam kelompok daya saing ini.

Dari daya saing infrastruktur dan sumber daya alam yang terdiri dari Panjang Jalan Raya km (ISDA1), Kualitas Jalan Raya % (ISDA2), Cakupan Pelayanan Perusahaan Air Bersih % (ISDA3), Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN (ISDA4), Persentase penduduk 5+ Memiliki/Menguasai Telepon Selular (ISDA5), Persentase penduduk 5+ menggunakan internet (ISDA6), Persentase Penduduk 5+ Penggunaan Komputer (ISDA7), dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum bersumber dari Leding Meteran (ISDA8). Dengan menggunakan indikator infrastruktur dan sumber daya alam, Kota Sungai Penuh berada pada peringkat pertama dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur pada peringkat terbawah.

Dari 4 aspek daya saing input yang telah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota menurut peringkat daya saing input, Kota Jambi yang unggul pada 3 kriteria input pada analisis sebelumnya, secara keseluruhan tetap menempati peringkat pertama dari daya saing input, disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun.

(b) Daya Saing Output

Daya saing selain dilihat dari indikator input juga dilakukan berdasarkan indikator output. Indikator output yang dilakukan pengukuran adalah:

- DSO1 : Produktivitas tenaga kerja
- DSO2 : Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
- DSO3 : PDRB per kapita
- DSO4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara rata-rata bobot tertinggi (peringkat 1) adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai sebesar 1.442. Komponen tertinggi adalah Produktivitas tenaga kerja (1.906) dan PDRB perkapita yaitu sebesar 1.898. 3 Daerah tertinggi selanjutnya berturut-turut adalah Tanjung Jabung Timur; Kota Sungai Penuh; dan Kota Jambi, masing-masing memiliki nilai 1.283; 1.096; dan 1.084. Sedangkan 3 daerah terendah adalah Kabupaten Merangin dengan nilai 0.785 (peringkat 11), Kabupaten Kerinci sebesar 0.797 (peringkat 10), dan Kabupaten Tebo sebesar 0.812 (peringkat 9).

(c) Daya Saing Input Output

Jika diakumulasikan antara indikator input dan output menunjukkan bahwa 4 Daerah yang memiliki kinerja tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan 4 daerah

dengan kinerja terendah adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Selanjutnya jika dilakukan pemetaan secara kuadran menunjukkan bahwa daerah yang berada pada:

Kuadran I : Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi; dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten/Kota tersebut mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator input dan outputnya.

Kuadran II: Kabupaten Sarolangun. Merupakan daerah yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator inputnya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator outputnya masih dibawah kinerja rata-rata.

Kuadran III: Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Batang Hari; Kabupaten Kerinci; Kabupaten Bungo; Kabupaten Tebo; dan Kabupaten Merangin. Merupakan daerah yang mempunyai karakteristik kinerja indikator input dan outputnya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata input dan output.

Kuadran IV: Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini mempunyai kinerja indikator outputnya unggul diatas kinerja rata-rata output, namun kinerja indikator inputnya masih rendah.

(3) Analisis BiPLOT

Berdasarkan analisis Biplot menunjukkan bahwa terdapat 6 kelompok obyek yang memiliki kemiripan karakteristik, yaitu:

- Kelompok 1 : Merangin dan Muaro Jambi
- Kelompok 2 : Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi
- Kelompok 3 : Bungo dan Kerinci
- Kelompok 4 : Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat
- Kelompok 5 : Batanghari dan Tebo
- Kelompok 6 : Tanjung Jabung Timur

Peubah yang memiliki keragaman paling besar adalah Tingkat Kemiskinan, sedangkan peubah yang memiliki keragaman paling kecil adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. kemudian nilai peubah pada suatu objek yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh mempunyai indeks performa tertinggi yaitu: Angka Melek Huruf, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM

(4) Sektor Unggulan

Dari penghitungan LQ tahun 2010 dan 2017 untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diperoleh sektor unggulan (ditunjukkan dengan nilai lebih dari satu). Untuk Kabupaten Kerinci, ada dua sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan relatif lebih tinggi dari sektor lain, yaitu sektor pertanian, kehutanan & perikanan, dan sektor Pengadaan Air. Selain kedua sektor tersebut, beberapa sektor yang menjadi sektor basis adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan wajar menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kerinci karena sektor ini memberikan kontribusi besar pada struktur ekonomi hampir sepanjang tahun kajian.

Tidak seperti Kabupaten Kerinci, di Kabupaten Sarolangun, sektor yang menjadi sektor basis tidak ada yang nilainya diatas 2, semua sektor basis memiliki nilai diatas 1 dan di bawah 2. Sektor yang memiliki nilai basis tertinggi adalah sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi penyediaan makanan dan minuman, dan sektor jasa lainnya. Kabupaten Muaro Bungo hanya memiliki 4 sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya. Sektor yang terendah nilai LQ nya adalah sektor Pertambangan & Penggalian dan sektor jasa pendidikan.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang memiliki nilai nonbasis yang terendah yaitu untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa perusahaan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Sektor basis tertinggi di Kabupaten Merangin berasal dari sektor pertanian, kehutanan, & perikanan dan sektor penyediaan penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Sektor basis di Kabupaten Batanghari yaitu terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, sektor jasa pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta sektor jasa lainnya.

Kota Sungai Penuh memiliki sektor basis yang nilainya diatas 5 yaitu sektor jasa perusahaan, sementara sektor lainnya yang termasuk basis adalah sektor informasi dan komunikasi. Untuk Tanjungjabung Barat maupun Tanjungjabung Timur, masih minim sektor yang menjadi sektor basis. Kabupaten Tanjungjabung Timur, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor basis. Fundamental ekonomi yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap perubahan eksternal yang terjadi, misalnya terjadinya fluktuasi harga minyak dunia yang dapat mengakibatkan terguncangnya perekonomian daerah yang bertumpu pada hasil bumi berupa minyak dan gas.

Jika dilihat berdasarkan perhitungan tipologi Klassen menunjukkan bahwa Secara umum, sebagian besar kabupaten di Provinsi Jambi memiliki keunggulan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk sektor ini, Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tergolong prima. Dapat dipahami untuk beberapa kabupaten dan kota yang tidak termasuk unggul di sektor ini adalah Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain itu, ada catatan penting bagi perekonomian Provinsi Jambi dalam hal daya saing sektoral di masing-masing kabupaten dan Kota. Ada tiga sektor yang masih tergolong sektor relatif terbelakang hampir di seluruh kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi. Sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, sektor real estate, dan sektor jasa pendidikan. Perlu upaya secara menyeluruh dan merata di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi untuk mendorong perkembangan sektor ini agar memiliki kontribusi dan daya saing yang pada akhirnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga sektor yang tergolong sektor prima di Kabupaten Kerinci, yaitu sektor Konstruksi, sektor Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Perkembangan sektor-sektor prima ini dapat dipahami karena di Kabupaten Kerinci dalam 3 tahun terakhir ini, kontribusi sektor tersebut dominan dalam struktur perekonomian daerah. Selain itu, pesatnya pembangunan di Kabupaten Kerinci, baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada perkembangan sektor konstruksi, sektor reparasi modil dan sepeda motor, serta pastinya kebutuhan akan informasi dan komunikasi.

Di Kabupaten Sarolangun, meskipun tidak ada sektor yang tergolong pada sektor prima, tetapi ada tiga sektor yang tergolong potensial untuk dikembangkan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan pada perekonomian Kabupaten Sarolangun ini adalah bahwa meskipun terdapat 3 sektor yang potensial dan satu sektor berkembang, akan tetapi hampir seluruh sektor lainnya yang berjumlah 14 sektor masih tergolong sektor relatif tertinggal. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan strategi pengembangan agar Kabupaten Sarolangun tidak tertinggal dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi.

Di Kabupaten Muaro Jambi, hanya ada dua sektor yang tergolong pada sektor prima, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan sektor industri pengolahan. Sektor lain masih tergolong sektor berkembang dan sektor relatif tertinggal. Sektor potensial potensial hanya ada satu, tetapi sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian sehingga tidak bisa dijadikan tumpuan dalam penentuan daya saing daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten yang tidak memiliki satupun sektor yang dapat digolongkan sebagai sektor prima, dan hanya memiliki 3 sektor potensial, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

Kemudian berdasarkan analisis *Shift Share* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor yang berada di kuadran 1 meliputi:

Kabupaten Kerinci, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Transportasi & Pergudangan.

Kabupaten Sarolangun, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kabupaten Muaro Jambi, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Merangin, yaitu Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Pengadaan Listrik dan Gas

Kabupaten Batang Hari, yaitu Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi

Kabupaten Tebo, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Bungo, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Transportasi & Pergudangan, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kota Jambi, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Konstruksi, Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kota Sungai Penuh, yaitu Informasi dan Komunikasi, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan

(5) Produk Unggulan

Produk unggulan daerah Provinsi Jambi sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 599/Kep.Gub/Balitbangda/2013 tentang Penetapan Pengembangan Komoditi Unggulan Lokal Penguatan Sistem Inovasi Daerah yaitu: (i) karet di Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Bungo dan Tebo; (ii) Sirsak di Kota Sungai Penuh; (iii) Kopi exelsa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; (iv) Casiavera di Kabupaten Kerinci; (v) Olahan ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (vi) Kelapa Sawit di Kabupaten Muaro Jambi, dan Batang Hari; dan (vii) Batik di Kota Jambi

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian pembuatan peta potensi investasi Provinsi Jambi Tahun 2017 yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi menunjukkan bahwa potensi Investasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

a) Kota Jambi

- Industri Pengolahan seperti remiling karet, batu bata, crumb rubber;
- Industri Manufaktur yaitu Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga serta Alat dapur dari kayu, bambu dan rotan;

- Usaha perdagangan besar maupun kecil serta reparasi mobil dan sepeda motor;
- Usaha dalam rangka peningkatan Infrastruktur Dasar seperti Air, Listrik, Telekomunikasi, dan Jalan;
- Usaha Konstruksi baik kecil, menengah dan besar bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil;
- Sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan sentra perdagangan sehingga diperlukan kemudahan dalam akses transportasi dan pergudangan;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restaurant atau rumah makan dan tempat wisata;
- Real estate

b) Kabupaten Muaro Jambi

- Pengembangan Industri Hilir Karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. Industri Hilir Karet antara lain :
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri Chemical Rubber
 - ✓ Industri Crumb Rubber
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan Dasar Karet dan plastic
- Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
 - ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.

- ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur
 - Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya untuk Industri Manufaktur
 - Transportasi Laut berupa pelabuhan yang perlu ditingkatkan sarana dan prasarannya agar lebih memadai dalam proses perdagangan
- c) Kabupaten Batang Hari
- Pengembangan Industri Hilir Karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. Industri Hilir Karet antara lain :
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri Chemical Rubber
 - ✓ Industri Crumb Rubber
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan Dasar Karet dan plastic
 - Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
 - ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.

- ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
- ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur
- Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya untuk Industri Manufaktur

d) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
 - ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.
 - ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur
- Pengembangan Industri Hilir Karet
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri Chemical Rubber
 - ✓ Industri Crumb Rubber
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan

- Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Pengembangan Industri Pengolahan Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan dan sejenisnya
- Pengembangan Industri Hulu dan Hilir Migas
 - ✓ Produk Bahan Bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
 - ✓ Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propilena, etilena, benzena, toluena, methanol dan sebagainya.

e) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Pengembangan Industri Hulu dan Hilir Migas
 - ✓ Produk Bahan Bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
 - ✓ Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propilena, etilena, benzena, toluena, methanol dan sebagainya.

(6) Analisis ICOR

Nilai ICOR secara tahunan menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan nilai terendah 3,42 dan nilai tertinggi 5,52. Secara umum, nilai ICOR rata-rata selama 2013-2017 ialah 4,69. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk menambah 1 unit output maka dibutuhkan 4,69 tambahan kapital yang tercermin dari investasi.

Angka ICOR di Provinsi Jambi relatif mengalami penurunan sampai tahun 2014 kemudian meningkat pada tahun 2015 dan menurun lagi hingga tahun 2017. Selama periode tersebut rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,69. Pada tahun 2013 dan 2014 angka ICOR masing-masing adalah 3,95 dan 3,42, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,52, dan kembali menurun menjadi 5,37 pada tahun 2016 dan 5,21 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Provinsi Jambi dinilai cukup efektif. Dalam hal ini, pada tahun 2013 dan 2014, untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit maka dibutuhkan tambahan investasi berturut-turut sebesar 3,95 satuan dan 3,42 satuan. Sedangkan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan 1 tambahan output ekonomi dibutuhkan tambahan investasi sebesar 5,52 satuan pada tahun 2015 dan 5,37 satuan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, tambahan 5,21 tambahan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak satu satuan. Secara umum, semakin kecil angka ICOR berarti investasi yang dilakukan semakin efisien namun angka ICOR ini menjadi lebih efisien apabila nilainya berkisar antara 3-4 persen.

Selain menggunakan pendekatan investasi = PMTB, ICOR juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan investasi = PMTB + Perubahan Inventori. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai perubahan inventori berfluktuatif dan memiliki rata-rata Rp725.856. Adanya perubahan inventori yang fluktuatif juga menyebabkan nilai PMTB total juga berfluktuatif namun memiliki tren peningkatan secara umum. Jika dilihat berdasarkan nilai ICOR, diketahui bahwa nilai ICOR meningkat menjadi 4,82 lebih besar dibandingkan ICOR dengan tanpa menggunakan perubahan inventori yaitu 4,69.

Di samping itu, angka ICOR yang dihitung dengan pendekatan nilai investasi yang terdiri dari akumulasi nilai PMTB dan perubahan inventori, juga menunjukkan trend kecenderungan yang sama dengan nilai ICOR

dengan tanpa perubahan inventori (Lihat gambar di atas). Dengan pendekatan tersebut, rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 4,82. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menambah output sebesar 1 unit dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 4,82 satuan tiap tahun. Secara umum, ICOR Provinsi Jambi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi daerah semakin efisien.

Pada tahun berikutnya, kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik (ditunjukkan dengan laju pertumbuhan nilai tambah yang mengalami penurunan dari 5,77 persen pada tahun 2015 menjadi 5,60 persen pada tahun 2016) menyebabkan kembali membaiknya angka ICOR di Provinsi Jambi. Membaiknya kondisi tersebut juga disebabkan oleh upaya yang cukup keras dari pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan implementasinya program pembangunan disamping kondisi makro ekonomi perekonomian nasional akibat kebijakan pusat termasuk didalamnya adalah paket kebijakan deregulasi dari pemerintah.

Sementara itu, dengan metode standar nilai ICOR di Provinsi Jambi pada lag 0 tersaji dalam tabel di atas. Pada periode 2013-2017 rata-rata koefisien ICOR Provinsi Jambi menurut sektor perekonomian, pada lag 0 sebesar 4,82. Pada lag ini, didapati bahwa sektor yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Adapun 2 sektor lain yang berada pada 3 sektor dengan nilai ICOR terendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Adapun koefisien ICOR paling besar pada ketiga lag tersebut adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta jasa perusahaan dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 5.608,09. Hal itu mencerminkan bahwa untuk meningkatkan tambahan output sebesar satu juta rupiah pada sektor tersebut di Provinsi Jambi membutuhkan margin kapital sebesar 5.608,09 juta rupiah.

Adapun kebutuhan investasi untuk beberapa tahun mendatang dapat diperkirakan dengan menggunakan angka ICOR dengan metode standar selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 4,82 dan target pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 serta pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya.

Selama periode 2013-2017, diketahui bahwa nilai ICOR standar di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,82 dengan asumsi laju inflasi tetap dan target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen pada tahun 2018 dengan demikian maka jumlah tambahan investasi yang diperlukan adalah sebesar 32.910.166,15 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen sehingga dibutuhkan tambahan investasi sebesar 38.011.241,9 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% dan 6,2% persen maka dibutuhkan tambahan investasi masing-masing sebesar 43.018.359,1 juta rupiah dan 47.872.871,59 juta rupiah.

Karena anggaran pemerintah tersebut sangatlah terbatas dengan demikian maka diharapkan peran swasta dan rumah tangga dalam penanaman modal di Provinsi Jambi lebih dioptimalkan, demi mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah pusat pada umumnya maupun Pemerintah Provinsi Jambi pada khususnya dirasa perlu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya pihak swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun asing berminat untuk menanamkan modal mereka.

Keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa hal berikut merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, Lapangan Usaha dengan koefisien ICOR kecil akan mendapat prioritas untuk melakukan investasi. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap

tenaga kerja yang besar, meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi perlu mendapat prioritas investasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengurangi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai backward dan forward linkages tinggi juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat prioritas investasi karena mempunyai multiplier effect yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (resource endowments) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya

(7) Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

(a) Kekuatan

- 1) Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis, Provinsi Jambi terletak pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura-Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan provinsi lain;
- 2) Provinsi Jambi memiliki sektor dan produk unggulan
- 3) Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan angka pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya
- 4) Ketersediaan sumber daya alam yang potensial berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (batu bara, emas, bentonit) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya.
- 5) Telah dibentuknya badan pelayanan terpadu satu pintu untuk menangani perizinan dan penanaman modal

- 6) Meningkatnya daya beli masyarakat, misalnya di Kota Jambi, dari 26,50 juta di tahun 2013, meningkat menjadi 29,62 juta di tahun 2014, dan di tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 37,01 juta

(b) Kelemahan

- 1) Daya saing provinsi Jambi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia masih berada pada posisi menengah
- 2) Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, dan transportasi darat maupun laut (pelabuhan). Contohnya kondisi jalan, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan dalam kota atau kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi dalam keadaan kurang mendukung kelancaran arus transportasi dari dan keluar Provinsi Jambi. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana investor asing sebagai akibatnya daerah ini akan mengalami kemajuan ekonomi yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih kaya dan memiliki infrastruktur yang memadai;
- 3) Minimnya ketersediaan data yang komprehensif
- 4) Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program investasi di daerah yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasi secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan;
- 5) Penguasaan teknologi yang masih rendah atau tradisional. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang menjadi faktor penting untuk bersaing di pasar bebas. Tingkat penguasaan teknologi di negara berkembang masih rendah sehingga output produk yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan negara maju. Cara-cara atau metode produksi masih bersifat tradisional.

- 6) Potensi Provinsi Jambi belum memiliki keunikan dan daya tarik yang spesifik, sehingga tidak memberikan *competitive advantage* dalam kemampuan bersaing
- 7) Masih kurangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi non-bank mengakibatkan masih belum optimalnya pemberdayaan UMKM.
- 8) Lemahnya promosi investasi di daerah, artinya lemahnya penyampaian informasi agar investor mau menanamkan modal di daerah masing-masing serta memperkuat citra daerah sebagai lahan investasi .
- 9) Masih Rendahnya kualitas, pasokan tenaga kerja, dan belum meratanya sebaran tenaga kerja antar-wilayah mengakibatkan kesempatan kerja yang ada dimanfaatkan oleh pendatang yang berasal dari luar Provinsi Jambi
- 10) Ketidakjelasan status lahan dapat menimbulkan rendahnya realisasi investasi dibandingkan rencananya, dan munculnya konflik sosial di lapangan.
- 11) Belum maksimalnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan investor untuk mengetahui peluang investasi dan peruntukan lahan.
- 12) Produk belum diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah)
- 13) Kepastian berusaha/hukum perlu ditingkatkan
- 14) Belum meratanya persebaran investasi
- 15) Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi. Sampai dengan saat ini jaringan koneksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan di Provinsi Jambi banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar yaitu pengumpul, pengecer dan grosir. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing produk, yang akibatnya lebih jauh adalah kelesuan untuk meningkatkan volume produksi. Perbaikan dan sistem koleksi dan distribusi selain bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk

juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh terdorongnya integrasi komponen-komponen produksi yang terkait di Provinsi Jambi;

- 16) Kurangnya pengembangan industri hilir di Provinsi Jambi. Kebanyakan di Provinsi Jambi lebih berorientasi pada Industri Hulu yaitu kegiatannya hanya mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi artinya sifatnya hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri. Sementara di Provinsi Jambi belum banyak memiliki Industri Hilir dimana kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Keberadaan industri hilir bertujuan untuk menyediakan barang- barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Industri hilir memiliki banyak manfaat bagi perekonomian diantaranya menambah devisa negara, memajukan potensi pengusaha lokal, membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

(c) Peluang

- 1) Masyarakat Provinsi Jambi yang heterogen, terutama penduduk asli Jambi lebih adaptif dan terbuka terhadap investasi dalam beberapa bidang
- 2) Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan daya saing daerah
- 3) Adanya berbagai pelaku dalam peningkatan daya saing daerah
- 4) Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah

sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai penjuru dunia;

- 5) Terjadinya bonus demografi di Provinsi Jambi, sehingga jumlah usia produktif akan mengalami peningkatan
- 6) Belum tersedianya *technopark* yang memungkinkan terciptanya peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi tepat guna
- 7) Meningkatnya geliat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi
- 8) Pelayanan penanaman modal di Jambi masih berpeluang besar untuk terus ditingkatkan
- 9) Adanya hubungan kerjasama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku-pelaku bisnis daerah Jambi (*private to private/people to people*). Kegiatan ini mempunyai dampak akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi.

(d) Ancaman/Tantangan

- 1) Struktur ekonomi Provinsi Jambi didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,41%); dan Pertambangan dan Penggalian (17,66%); sedangkan Industri Pengolahan hanya 10,28%
- 2) Industri pengolahan mengalami perlambatan dan mengarah pada penurunan. Kontribusi pada tahun 2013 sebesar 11,15% dan terus menurun hingga menyentuh level 10,28% di tahun 2017
- 3) Fluktuasi harga produk perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit yang sangat tergantung pada harga secara nasional maupun internasional.
- 4) Adanya dampak negatif terhadap usaha bidang pertanian secara umum (pertanian, kehutanan, pertambangan dan penggalian)
- 5) Adanya perdagangan bebas, seperti MEA akan meningkatkan persaingan

- 6) Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi masih tergantung pada daerah lain dalam ketersediaan dan kemandirian pangan, terutama bahan makanan utama
- 7) Pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*
- 8) Keterbatasan kemampuan dalam menembus pasar regional dan nasional untuk produk UMKM dan kesamaan karakteristiknya dengan Provinsi Sumatera Selatan
- 9) Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terjadi perlambatan, pada tahun 2013 sebesar 6,84 dan tahun 2017 hanya sebesar 4,64%

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Jambi seyogyanya perlu melakukan strategi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal (investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)
- (2) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur, seperti: jalan, energi, dll
- (3) Meningkatkan sumber pendanaan daerah, diantaranya dengan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah
- (4) Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktivitas dan mutu produk, terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan
- (5) Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja
- (6) Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing

(7) Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*

Adapun roadmap peningkatan daya saing di Provinsi Jambi dapat dilihat pada **Lampiran** laporan ini.